

ABSTRAK

Judul penelitian ini ialah Deskripsi tentang putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana usaha migas. Masalah pokoknya diteliti penulis ialah mengapa hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan pembedaan kepada pelaku tindak pidana usaha migas dan mengapa mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana usaha migas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan pembedaan kepada pelaku tindak pidana usaha migas dan untuk mengetahui alasan hakim mahkamah agung menjatuhkan putusan bebas pada pelaku tindak pidana usaha migas. Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Alasan hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (judex facti) memutuskan pembedaan terhadap pelaku tindak pidana usaha migas. a. Pengadilan Negeri memutuskan pembedaan karena: 1).terdakwa terbukti melakukan tindak pidana usaha migas 2).terdakwa telah melakukan kegiatan pembelian dan penjualan bbm solar untuk mendapatkan keuntungan. 3).terdakwa secara bersama-sama telah melakukan kegiatan pembelian dan penjualan bbm solar tanpa ada surat ijin usaha niaga minyak dan gas bumi dari pihak yang berwenang. b. pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri disebabkan karena: 1). Hakim pengadilan negeri telah memutuskan dengan mempertimbangkan fakta dan hukum secara benar. 2). Dalam fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa adalah seorang nahkoda yang melakukan kegiatan usaha migas secara ilegal. c. alasan Mahkamah agung (judex juris) menjatuhkan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana usaha migas: 1). Hakim judex facti dipandang salah dalam menerapkan hukum. 2). Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana usaha migas Sehubungan dengan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut: 1. Dalam memutuskan perkara hakim hendaknya mempertimbangkan putusan dengan baik, harus didasarkan pemahaman penerapan hukum materil apa yang tepat diterapkan kepada pelaku tindak pidana usaha migas. 2. Hendaknya dalam penyelesaian masalah ini, kiranya pemerintah daerah mensosialisasikan bagaimana cara mendaftarkan ijin usaha dan dampak dari melakukan kegiatan ini agar kejadian ini tidak terulang kembali dan masyarakat dapat mengetahui wujud dari hukum tersebut serta memberikan efek jera kepada masyarakat yang sering melakukan kegiatan usaha migas.

Kata kunci : putusan pengadilan, usaha migas

ABSTRACT

The title of this research is a description of court decisions against perpetrators of oil and gas business crimes. The main problem researched by the author is why district court judges and high court judges pass criminal decisions on perpetrators of oil and gas business crimes and why the supreme court hands down acquittals on perpetrators of oil and gas business crimes. The aim of this research is to find out the reasons why district court judges and high court judges hand down criminal decisions to perpetrators of oil and gas business crimes and to find out the reasons why supreme court judges hand down acquittals to perpetrators of oil and gas business crimes. The type of legal research used is normative research and the nature of the research used by the author is descriptive. The data collection technique in this writing uses document study or library materials. The results of the research carried out by the author are then formulated and the following conclusions are drawn: 1. Reasons for judges at the District Court and High Court (*judex facti*) for deciding to punish perpetrators of oil and gas business crimes. a. The District Court decided the sentence because: 1). the defendant was proven to have committed a criminal offense in the oil and gas business. 2). the defendant had carried out buying and selling diesel fuel activities to make a profit. 3). The defendants have jointly carried out purchasing and selling activities of diesel fuel without having an oil and gas trading business license from the authorized party. b. the high court upheld the district court's decision because: 1). The district court judge has decided by considering the facts and law correctly. 2). In the facts of the trial it was revealed that the defendant was a captain who carried out oil and gas business activities illegally. c. reasons for the Supreme Court (*judex juris*) handing down acquittals to perpetrators of oil and gas business crimes: 1). *Judex facti* judges are seen as wrong in applying the law. 2). The defendant is not proven to have committed an oil and gas business crime. In connection with the above conclusions, the author makes the following suggestions: 1. In deciding the case the judge should consider the decision carefully, it must be based on an understanding of the application of material law which is appropriate to be applied to perpetrators of oil and gas business crimes. 2. In resolving this problem, the local government should socialize how to register a business permit and the impacts of carrying out this activity so that this incident does not happen again and the public can know the nature of this law and provide a deterrent effect to people who often carry out oil and gas business activities.

Key words: court decisions, oil and gas business